

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hierarki Gereja Katolik di Indonesia, sebagai penanggung jawab, pengatur, dan pengelola urusan Gereja Katolik, hingga saat ini, masih memiliki peranan dan pengaruh yang penting di hampir segala aspek kehidupan. Hal itu disebabkan karena sejak pertama kali hadir di bumi Nusantara ini, Gereja, melalui hierarkinya telah memberikan perhatian yang besar bagi pemberdayaan dan pengembangan manusia di samping pelaksanaan misi besarnya yakni penyebaran Kabar Gembira Injil dan penanaman iman akan Kristus.

Meskipun kerap kali masih dianggap sebagai produk kolonial, Gereja di bawah kepemimpinan kaum hierarki tak pernah henti-hentinya berjuang membuktikan bahwa tujuan utama kehadirannya berseberangan dengan tujuan kedatangan kolonial. Perjuangan itu ditempuh melalui berbagai macam cara seperti melakukan pendampingan umat, mengadakan pelatihan, mendirikan sekolah-sekolah, pembangunan sarana prasarana, dan lain sebagainya. Buah dari perjuangan-perjuangan tersebut dapat dengan mudah ditemukan saat ini.

Catatan-catatan sejarah menunjukkan bahwa sejak awal kedatangannya, bahkan sebelum Indonesia diakui sebagai sebuah negara, Gereja Katolik sudah terlibat di seluruh aspek kehidupan manusia. Keterlibatan itu tentu bertolak dari inti iman Kristen sendiri yakni misteri inkarnasi, yang dipahami sebagai misteri penjelmaan Tuhan dalam diri Yesus Kristus, atau cara Allah masuk ke dalam sejarah kehidupan manusia demi mengusahakan keselamatan bagi manusia.<sup>1</sup> Salah satu bentuk keterlibatan Gereja dalam kehidupan manusia Indonesia yang diangkat di dalam tulisan ini ialah keterlibatan Gereja sebagai hierarki dalam dunia politik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ignas Kleden, "Antara Teologi Politik dan Sosiologi Keselamatan", *Kata Pengantar*, dalam Eddy Kristiyanto, *Sakramen Politik: Mempertanggungjawabkan Memoria* (Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2008), hlm. x.

<sup>2</sup> Pengertian politik yang dimaksudkan di dalam tulisan ini merujuk pada pemahaman terhadap Politik dengan huruf 'P' besar seperti yang sudah dibedakan oleh para Uskup dalam pertemuan di Puebla dan yang sudah diberi nama oleh Leonardo Boff. Politik dengan huruf 'P' besar atau sering disebut politik dalam arti yang mulia memiliki beberapa tujuan seperti mencari dan mengejar kesejahteraan bersama, mempromosikan keadilan dan hak asasi manusia, mendamaikan kesetaraan dan kebebasan, dan lain-lain. Melalui tujuan-tujuan tersebut, Gereja mempromosikan nilai-nilai

Pada dasarnya, keterlibatan hierarki Gereja dalam dunia politik merupakan bentuk kepedulian Gereja universal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di mana Gereja berada. Kepedulian itu bahkan sudah ditunjukkan sejak Gereja pertama kali hadir pada abad ke-XIV. Di tengah gempuran keraguan dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat yang dilayani, Gereja tetap berpegang pada komitmennya untuk ikut mengambil bagian dalam mengembangkan kehidupan manusia. Akan tetapi, tidak dapat disangkal bahwa keterlibatan hierarki Gereja dalam dunia politik mengalami kemunduran seiring lahirnya negara, berkembangnya pemahaman masyarakat dan politik, perubahan orientasi pelayanan Gereja sendiri, dan lain-lain. Baru dalam beberapa dekade belakangan ini, keterlibatan hierarki Gereja dalam dunia politik mulai mendapatkan perhatian lagi.

Pembicaraan perihal keterlibatan Gereja sebagai hierarki dalam dunia politik di Indonesia hingga saat ini masih menjadi tema yang penting dan cukup sensitif. Dikatakan penting karena, dunia terutama dalam bidang politik telah mengalami kemerosotan dan kemunduran yang cukup signifikan, dan cenderung menyimpang dari hekekat dasar keberadaannya yang berdampak pada pengabaian terhadap usaha menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Penyimpangan itu selain terjadi karena adanya upaya pemisahan antara agama dan negara, juga disinyalir terjadi karena minimnya kontrol terhadap aktivitas politik dari masyarakat atau lembaga-lembaga keagamaan yang ada di dalam negara. Sedangkan, dikatakan sensitif karena keterlibatan hierarki Gereja di dalam dunia politik sendiri sering kali melahirkan gesekan-gesekan yang dapat memicu konflik, bahkan dari dalam tubuh Gereja sendiri.

Gesekan yang terjadi karena keterlibatan hierarki Gereja dalam dunia politik pada umumnya dipengaruhi oleh adanya pandangan yang berbeda, terutama dalam melihat relasi antara Gereja dengan negara atau politik dan diperkuat dengan ketakutan-ketakutan yang muncul karena catatan sejarah antara keduanya di sepanjang sejarah peradaban manusia. Di satu sisi, ada yang

---

luhur untuk menuntun dunia politik dengan huruf ‘p’ kecil dan memantau serta menafsir aspirasi setiap masyarakat. Bdk. Alexander Jebadu, “Dimensi Politik Dari Misi Pembebasan Gereja Bagi Orang Miskin Dan Pemeliharaan Alam Ciptaan,” *Jurnal Teologi*, 6.2 (2017), hlm. 175–177. Tentang hal ini akan secara khusus dibahas dalam Bab II.

beranggapan bahwa keterlibatan Gereja dalam dunia politik merupakan sebuah keharusan sebagai upaya untuk mengusahakan terciptanya Kerajaan Allah di dunia melalui pengentasan persoalan kemanusiaan, pemiskinan, perendahan martabat manusia, eksploitasi alam dan manusia, dan berbagai praktek penindasan lainnya. Namun, di sisi yang lain ada juga yang beranggapan bahwa Gereja tidak perlu terlibat di dalam dunia politik karena di dalam ruang tersebut agama (Gereja) sering kali diperalat, dimanipulasi, dan ditunggangi untuk melegitimasi kekuasaan semata.<sup>3</sup>

Gereja dan politik sebagai representasi agama dan negara, telah menjadi aspek fundamental dalam hidup manusia baik sebagai orang yang percaya atau beragama maupun sebagai orang yang berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hubungan atau pola relasi yang terjalin di antara keduanya tentu akan memberi dampak yang cukup signifikan pada bidang-bidang kehidupan manusia lainnya.

Usaha menelisik relasi atau keterlibatan hierarki Gereja dalam dunia politik tentu tidak dapat dilepaspisahkan dari pembicaraan tentang sejarah relasi antara Gereja dan negara. Pembicaraan tentang relasi kedua institusi ini (seperti halnya dalam diskursus teologi kristen), bukanlah sesuatu yang diadakan melainkan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan.<sup>4</sup> Hal ini bertolak dari kenyataan bahwa iman yang diperjuangkan, dipertahankan dan ditunjukkan oleh Gereja tidak pernah terlepas dari konteks kekuasaan duniawi. Iman itu lahir, bertumbuh dan berkembang dalam suatu masa pemerintahan atau wilayah teritorial suatu bangsa atau negara tertentu.

Relasi antara Gereja dan negara mengalami pasang surut dari masa ke masa. Pada masa-masa awal, ketika kemunculannya, relasi antara keduanya terbilang kurang harmonis karena orang-orang yang menjadi anggota Gereja diburu, dianiaya, bahkan dibunuh oleh penguasa negara pada masa itu. Para penguasa melihat Gereja memiliki potensi membawa kekacauan bagi kehidupan ekonomi lokal dan tantangan ketertiban kekaisaran.<sup>5</sup> Ini disebabkan oleh

---

<sup>3</sup> Eddy Kristiyanto, *Sakramen Politik: Mempertanggungjawabkan Memoria* (Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2008), hlm. 42.

<sup>4</sup> Minggu Minarto Pranoto, 'Relasi Gereja Dengan Negara: Sebuah Perspektif Teologi Kristen', *Jurnal Amanat Agung*, 5.1 (2009), hlm. 1.

<sup>5</sup> Dale T. Irvin dan Scott W. Sunquist, *Kekristenan: Gerakan Universal, Sebuah Ulasan Sejarah* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2004), hlm. 116.

pandangan Gereja yang berseberangan dengan keyakinan umum dan tidak mengakui keilahian kaisar Romawi serta memandang kekuasaan duniawi sebagai sesuatu yang dapat salah.<sup>6</sup> Keadaan ini berlangsung selama dua abad awal sejak kelahiran Gereja sampai diterbitkannya *Edik Milano* pada tahun 313 M oleh Kaisar Konstantinus Agung.

Masa-masa pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung menjadi satu masa di mana Gereja memperoleh kebebasan dalam menampakkan ‘dirinya’ di tengah dunia. Orang-orang Kristen yang telah menjadi penduduk tanpa ‘tanah air’ selama lebih dari dua abad tiba-tiba beralih status menjadi ‘tuan tanah’. Agama Kristen menjadi agama pilihan kekaisaran dan untuk pertama kali para klerus mendapatkan pembebasan dari pajak kekaisaran.<sup>7</sup>

Pola relasi yang terbentuk antara Gereja dan negara pasca penerbitan *Edik Milano* membawa dampak yang tidak kecil bagi keduanya terlebih khusus untuk Gereja. Atas nama kebebasan, Gereja kerap rela dijadikan sebagai ‘budak’ oleh negara. Perlindungan terhadap Gereja dan jaminan kesuksesan pelaksanaan karya kerasulan sering kali mendorong lahirnya kontrol yang ketat oleh negara atas segala aktivitas Gereja yang pada akhirnya berdampak pada kelumpuhan dan penderitaan Gereja sendiri.<sup>8</sup> Gereja dengan demikian tanpa disadari mengalami kehilangan sebagian besar kebebasannya.

Setelah penerbitan *Edik Milano* dan berakhirnya masa kepemimpinan Kaisar Konstantinus, relasi antara Gereja dan negara sangat kuat dipengaruhi oleh pemimpin (kaisar) yang berkuasa. Apabila pemimpin yang berkuasa memiliki simpati terhadap Gereja maka relasi antara Gereja dan negara terbilang baik, demikian pula sebaliknya.

Keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 M, mendorong Gereja untuk mulai menunjukkan dominasi dan pengaruhnya di hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Gereja dengan berani mempromulgasikan dirinya sebagai otoritas tertinggi dan dengan tegas menolak segala bentuk intervensi. Setiap intervensi baik yang datang dari luar maupun dari dalam tubuh Gereja

---

<sup>6</sup> Zakaria J Ngelow, ‘Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia’, *Jurnal Jaffray*, 12.2 (2014), hlm. 216.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

<sup>8</sup> Eddy Kristiyanto, ‘Absolutisme Negara Dan Lembaga Agama: Pasca Aufklärung Di Eropa Barat’, *Melintas*, 21.2 (2005), hlm. 214.

sendiri akan dianggap sebagai usaha melawan dan akan diberi ganjaran berupa hukuman. Pada masa ini, tidak terdapat batasan yang jelas antara Gereja dan Negara yang juga menjadi salah satu pemicu terjadinya perpecahan Gereja. Keintiman relasi para pemimpin Gereja dan para penguasa (raja atau kaisar) mendorong Gereja untuk seringkali turut mengambil bagian di dalam setiap keputusan dan aktivitas para raja yang pada akhirnya mendorong para pemimpinnya sendiri sibuk berebut kekayaan dan penghormatan.<sup>9</sup> Kondisi tersebut melahirkan banyak penyimpangan dan ikut menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa kelam yang ditandai dengan keterbelakangan ilmu pengetahuan, penjualan indulgensi, maraknya mitos dan takhyul, inkuisisi, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Pengaruh Gereja selama abad pertengahan mulai mengalami penurunan pada masa peralihan menuju zaman modern atau peremajaan bangsa yang dikenal dengan istilah *renaissance* dan masa pendewasaan bangsa Eropa atau *aufklärung*. Munculnya ketertarikan terhadap peninggalan-peninggalan Yunani dan Romawi kuno seperti seni, arsitektur, sastra, musik dan pengetahuan-pengetahuan ilmiah menjadi tanda kehadiran kedua masa tersebut. Pada masa *renaissance*, orang-orang berusaha menggali dan mengembangkan potensi pribadinya sedangkan pada masa *aufklärung* para pemikir mulai berani mengkritisi otoritas Gereja serta mengusahakan adanya kebebasan berpikir dan berpendapat, serta mendorong adanya pemisahan yang jelas antara agama dan ilmu pengetahuan, juga agama dan negara.<sup>11</sup>

Peristiwa-peristiwa masa lalu dan sejarah 'kelam' abad pertengahan yang tampaknya menjadikan Gereja sebagai aktor utamanya, tak bisa dipungkiri telah menyebabkan munculnya keraguan terhadap Gereja dan para pejabatnya.<sup>12</sup> Meski masih memiliki pengaruh di beberapa aspek kehidupan seperti penyebaran iman, Gereja tidak lagi memiliki kontrol yang sama terhadap kebijakan sosial, ekonomi dan politik. Perubahan ini terutama tampak dalam relasi antara Gereja dan negara setelah munculnya *renaissance*, *aufklärung* dan berpuncak pada peristiwa *revolusi*

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Dale T. Irvin dan Scott W. Sunquist, *op. cit.*, hlm. 333-363.

<sup>11</sup> Zakaria J. Ngelow, *op. cit.*, hlm. 218-220.

<sup>12</sup> Al. Andang L. Binawan, *Demokratisasi Dalam Paroki: Mungkinkah?* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), hlm. 13-14.

*Prancis* dengan slogan *liberte, egalite, dan fraternite*-nya.<sup>13</sup> Banyak negara yang mengadopsi model negara sekuler yang membuat pemisahan secara jelas antara urusan Gereja dan urusan negara. Gereja mengurus hal-hal privat manusia dan negara mengurus segala aktivitas yang berkaitan dengan ranah publik.

Perubahan-perubahan situasi sosio-politik dan sosio-kultural di dunia Barat tak dipungkiri telah turut mendorong perubahan Gereja di segala aspek kehidupannya. Gereja yang sejak kemunculannya telah menghadapi berbagai persoalan perlahan-lahan berjuang untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang terjadi di sekitarnya. Gereja pun mulai terbuka untuk merefleksikan eksistensinya di dunia, mengakui keberadaan suatu negara, mengakui kebebasan berpikir, dan menyadari diri sebagai entitas rohani (spiritual) dengan tetap memiliki dimensi organisatoris yang bersifat sosial-politis.<sup>14</sup>

Perubahan dan perkembangan di dunia Barat serta peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bentuk ‘keraguan’ terhadap keberadaan Gereja berpengaruh besar terhadap pola relasi antara Gereja dan negara di masa-masa setelahnya. Selain itu juga perubahan dan perkembangan itu memicu dibentangkannya sayap-sayap misi ke berbagai penjuru dunia (di luar Dunia Barat). Keadaan tersebut sejalan dan bahkan didukung dengan meningkatnya penemuan-penemuan dan munculnya semangat ekspansi bangsa-bangsa Barat ke dunia yang baru. Di dalam situasi inilah gerakan misi itu muncul meski tak bisa dipungkiri harus bercampur dengan agenda-agenda politik.<sup>15</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran misi Gereja sejak kedatangannya bersama kolonial pada awal abad ke-XVI.<sup>16</sup> Setelah beberapa

---

<sup>13</sup> Al. Andang L. Binawan, ‘Tiga Fase Nisbah Hukum Gereja Dengan Hukum Sipil’, *Justitia*, 8.2 (2022), hlm. 322–329.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Tony Salurante, ‘Berteologi Global Dan Bermisi Dalam Konteks: Sebuah Usulan Kontekstualisasi Kekristenan Masa Kini’, *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 4.2 (2020), hlm. 229.

<sup>16</sup> Ada informasi yang berbeda berkaitan dengan periode kedatangan Gereja ke wilayah Indonesia. Informasi terkuno tentang kehadiran Gereja Katolik di Indonesia diperoleh dari Syeik Abu Salih al-Irmin (seorang pakar sejarah termasyhur yang hidup sekitar tahun 1150). Ia menerbitkan daftar 707 Gereja Kristen dan 181 pertapaan di Mesir, Nubia, Abessinia, Afrika Barat, Spanyol, Arabia, India, dan Indonesia. Dalam salah satu bagian Abu Salih menulis “Di Fansur (sebuah daerah di dusun Pancur, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang dekat dengan Baros) ada beberapa Gereja, yang termasuk kelompok Kristen Nestorian. Dari situ dihasilkan ‘Kamfer Barus’, suatu zat yang menetes dari pohon-pohon. Di kota itu berdiri gereja, yang ditandai dengan nama Perawan Maria Tak Bernoda.” Diperkirakan Gereja tersebut didirikan sekitar tahun 645. Dalam penyelidikan

abad melaksanakan misinya di Indonesia, Gereja yang juga turut serta mengambil bagian dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan pengembangan masyarakat itu,<sup>17</sup> didorong untuk bertransformasi terlebih khusus dalam tiga aspek penting yakni aspek teologis, aspek daya, dan aspek dana. Gereja di Indonesia yang sebelumnya menjadi sasaran misi Gereja dan lebih banyak bergantung pada Gereja-Gereja Barat di hampir segala aspek kehidupannya, harus berjuang berdiri sendiri dan secara baru memahami dirinya sebagai Gereja yang mandiri terutama dalam ketiga aspek tersebut (aspek teologis, aspek daya, dan aspek dana).<sup>18</sup>

Dalam sejarahnya, pertumbuhan Gereja Katolik menjadi Gereja lokal yang mandiri dimulai pada 1 Agustus 1940 ketika Pater Soegijapranata S.J. diangkat menjadi Vikaris Apostolik Semarang, Jawa Tengah dan menjadi Uskup pertama yang berasal dari Indonesia.<sup>19</sup> Sampai saat ini, usaha membangun Gereja yang mandiri itu masih tetap menjadi landasan perjuangan Gereja-Gereja di Indonesia dan ditempuh melalui berbagai macam kebijakan seperti penetapan iuran wajib, pengolahan lahan atau kebun paroki, pendirian koperasi-koperasi, dan lain sebagainya.

---

selanjutnya ditemukan bahwa yang disebut kelompok Kristen Nestorian ialah umat Katolik. Dalam dokumen-dokumen lain diketahui bahwa pada abad XIII ada beberapa keuskupan di Pulau Sumatra dan Jawa. Bdk. Dr. Huub J. W. M. Boelaars, *Indonesianisasi: Dari Gereja Katolik Di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), hlm. 60–61.

<sup>17</sup> Sejak semula umat Katolik di Indonesia mengambil sikap yang jelas dan tegas berkaitan dengan relasinya dengan ‘dunia’. Gereja membuka diri dan terbuka terhadap lingkungan di sekitarnya dan tidak mau menjadi kelompok tertutup. Sikap yang dipelopori oleh Pater van Lith S.J., itu tampak jelas dalam berbagai usaha pelayanan yang diselenggarakan oleh umat Katolik (Gereja) dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga pendidikan dan latihan, perawatan orang sakit, lembaga-lembaga sosial-ekonomi, dan lain sebagainya. Bdk. Marcel Beding, B.S. Mardiatmadja S.J. Dkk., *Gereja Indonesia Pasca-Vatikan II: Refleksi Dan Tantangan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997), hlm. 24.

<sup>18</sup> Penggunaan term ‘kemandirian Gereja’ dalam tulisan ini merujuk pada kemandirian Gereja sebagai sebuah institusi atau lembaga yang memiliki kuasa atau kontrol terhadap urusan internal Gereja, sedangkan term ‘kemandirian umat’ yang menjadi fokus dalam keseluruhan tulisan ini, merujuk pada kemandirian individu-individu atau awam. Dalam praktiknya, kedua konsep tersebut memiliki keterkaitan yang erat, tetapi dalam konteks tertentu juga dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

<sup>19</sup> Visi Gereja yang mengakar dan mandiri merupakan ide yang lahir dari sosok Paus Pius XII. Dalam pesannya kepada Mgr. Soegija (*pesan ini disampaikan langsung oleh Mgr. Soegija dalam perayaan ulang tahun Vikariat Semarang pada 3 Februari 1953*), Paus Pius XII mengharapkan agar diusahakan beberapa hal yakni ‘mengadakan persiapan akan terbentuknya daerah Gereja Katolik yang berdiri sendiri, merdeka dan berdaulat, yang diurus oleh seorang uskup dari suku bangsa asli, di bawah pengawasan Sri Paus, sebagai kepala Gereja Roma Katolik di seluruh dunia.’ Bdk. Theodorus Sudirmin, “Makna Kemandirian Gereja”, *Majalah Salam Damai*, 132.12 (2020), hlm. 13.

Namun, penting untuk diakui bahwa perjuangan untuk mewujudkan Gereja yang mandiri tidak berlangsung dengan mudah. Ada begitu banyak tantangan yang merintanginya hingga saat ini. Salah satu tantangan ialah semakin minimnya keterlibatan Gereja dan hierarkinya dalam aktivitas politik di beberapa waktu belakangan. Hal tersebut disinyalir terjadi karena Gereja dan hierarkinya belum sepenuhnya menyadari tugas dan tanggungjawab politisnya, dan masih cenderung melihat dirinya sebagai bagian yang terpisah dari umat sehingga berdampak pada ketidakjelasan bentuk pilihan keterlibatannya.<sup>20</sup>

Gereja sebagai bagian konstitutif dari masyarakat dunia, seperti yang diungkapkan dalam *Gaudium et Spes*, sesungguhnya didorong untuk turut merasakan dan terlibat aktif dalam menanggapi pelbagai persoalan yang menimpa masyarakat terutama yang berada di sekitarnya, termasuk di dalam politik. Secara sangat jelas *Gaudium et Spes* menekankan hal ini; “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan masyarakat dunia zaman ini, terutama yang menimpa mereka yang miskin atau menderita apa saja, maka semua hal ini merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan dari para pengikut Kristus (Gereja) pula.”<sup>21</sup>

Dengan demikian, sikap ‘diam’ yang ditunjukkan Gereja dan hierarkinya di tengah begitu maraknya persoalan yang terjadi di sekitarnya dan bahkan di dalam Gereja sendiri tidak dapat dibenarkan. Gereja, melalui hierarkinya, semestinya berani untuk memilih berpihak kepada orang-orang yang tertindas dan menderita serta harus terlibat aktif dalam setiap upaya untuk mengusahakan terciptanya kesejahteraan dan kebaikan hidup bersama. Dalam konteks ini, keterlibatan hierarki Gereja dalam dunia politik pun dapat menjadi solusi yang patut untuk digalakkan kembali.

Keterlibatan hierarki Gereja di dalam dunia politik dan segala aktivitasnya, hemat penulis, bukanlah pilihan yang keliru atau bahkan salah. Gereja dan juga hierarkinya harus terus berjuang memandang politik dari sudut pandang yang positif dan tidak melulu melihatnya sebagai sesuatu yang buruk, kotor, dan lain

---

<sup>20</sup> Jos Gowing Bataona, “Memaknai Persitiwa Rm. Frans Amanue dalam Bingkai Kekerasan di Bidang Politik”, dalam Emanuel J. Embu dan Amatus Woi, ed., *Berpastoral di Tapal Batas: Pertemuan Pastoral VI Konferensi Waligereja Nusa Tenggara* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2004), hlm. 226–231.

<sup>21</sup> Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawirayana SJ, cetakan XI (Jakarta: Obor, 2012), hlm. 521-522.



sebagainya. Di tengah modernisme dan globalisasi zaman ini, Gereja semestinya mulai terbuka untuk membangun kembali relasi yang baik dengan negara atau politik setelah melalui berbagai macam pengalaman berharga di masa lalu dengan tetap berpegang pada batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen atau hukum Gereja. Dengan caranya sendiri dan khas, Gereja melalui hierarkinya harus tetap melaksanakan dimensi politisnya di dunia, terlebih lagi jika hal itu akan berdampak pada terciptanya kebaikan dan kesejahteraan hidup bersama melalui pengembangan kemandirian Gereja dan umatnya.

Politik dan segala pengertian yang kompleks tentangnya tak dapat dipungkiri menjadi salah satu sarana yang tampan bagi Gereja untuk mengembangkan kehidupan Gereja dan komunitasnya. Gereja yang hadir dan hidup di tengah di dunia, dengan demikian, tidak dapat melepaskan pandangan dan perhatiannya dari realita tersebut.

Paroki Santo Joanne Baptista Wolosambi sebagai sebuah unit administratif Gerejani dan unit reksa pastoral, melalui hierarkinya, juga dituntut untuk mengusahakan kemandirian bagi Gereja dan terlebih khusus bagi umatnya. Selain mengusahakan pengembangan kemandirian melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat seperti penetapan iuran wajib, gotong royong, pengolahan lahan, dan lain-lain, Gereja melalui hierarkinya juga dituntut untuk ikut terlibat aktif dalam dunia politik dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan publik yang mengutamakan prinsip keadilan dan melayani kebenaran serta kebaikan bagi banyak orang, yang tentu akan berdampak langsung pada pengembangan kemandirian umat.<sup>22</sup>

Sejauh pengamatan penulis, usaha pengembangan kemandirian yang telah digalakkan dalam lingkup Paroki Santo Joanne Baptista Wolosambi masih berfokus pada pengembangan kemandirian Gereja sebagai sebuah institusi. Hal ini terkesan mengabaikan pengembangan kemandirian umat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keberadaan Gereja sendiri. Di dalam karya ilmiah ini, penulis

---

<sup>22</sup> Istilah 'umat' yang digunakan dalam tulisan ini merujuk pada segenap jemaat beriman 'biasa' atau awam Katolik. Penggunaan tersebut berangkat dari kenyataan bahwa dalam hidup keseharian, istilah 'umat' kerap digunakan atau melekat dalam diri awam, meskipun secara teologis dan yuridis gerejawi, imam, para religius, dan pimpinan Gereja yakni uskup termasuk di dalamnya. Bdk. Dr. Huub J. W. M. Boelaars, *op. cit.*, hlm. 187.

hendak mengamati, menggali, dan menilai lebih jauh tentang sumbangsih nyata Gereja melalui hierarkinya yang memiliki peranan penting dalam aktivitas dan kehidupan Gereja setempat, bagi pengembangan kemandirian umatnya.

Upaya mengamati, menggali dan menilai tersebut dilakukan atas dasar keyakinan bahwa kemandirian umat merupakan fondasi dasar dari kemandirian Gereja secara keseluruhan. Oleh karena itu, perhatian utama karya pelayanan pastoral semestinya diarahkan kepada pemberdayaan dan pengembangan kemandirian umat dan bukan terutama kepada Gereja sebagai sebuah institusi.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kemandirian umat akan memberi dampak pada kemandirian Gereja sebagai sebuah institusi, sedangkan kemandirian Gereja belum tentu memberi dampak pada kemandirian umat jika tidak diupayakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu bentuk sumbangsih nyata Gereja bagi pengembangan kemandirian umat dapat diupayakan melalui keterlibatan hierarki Gereja di dalam dunia politik.

Keterlibatan hierarki Gereja dalam politik dapat mempengaruhi penentuan kebijakan-kebijakan politis yang mengutamakan prinsip keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan bersama. Penentuan kebijakan politis atas dasar prinsip-prinsip itu akan berdampak pada pengembangan kehidupan bersama dalam segala bidang. Salah satu bidang yang menjadi fokus perhatian karya ilmiah ini ialah kemandirian umat.

Oleh karena itu, pengembangan kemandirian umat akan sangat bergantung pada sejauh mana hierarki Gereja terlibat dalam politik. Dengan kata lain, intensitas keterlibatan hierarki Gereja dalam politik akan berdampak langsung pada pengembangan kemandirian umat sendiri. Dengan demikian, penulis mendeskripsikan karya ilmiah ini dengan judul **Keterlibatan Hierarki Gereja dalam Dunia Politik dan Urgensinya bagi Pengembangan Kemandirian Umat di Paroki Santo Joanne Baptista Wolosambi.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, dirumuskan dua pokok persoalan yang akan dikaji dalam keseluruhan penulisan karya ilmiah ini yakni; *Pertama*, Bagaimana keterlibatan hierarki Gereja Santo Joanne Baptista Wolosambi dalam dunia politik? *Kedua*, Apa urgensi keterlibatan hierarki Gereja

dalam dunia politik bagi pengembangan kemandirian umat di Paroki Santo Joanne Baptista Wolosambi?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini yakni: *Pertama*, menganalisis dan menilai keterlibatan hierarki Gereja Santo Joanne Baptista Wolosambi dalam dunia politik; *Kedua*, menemukan jawaban atas pertanyaan tentang urgensi keterlibatan hierarki Gereja Santo Joanne Baptista Wolosambi dalam dunia politik bagi pengembangan kemandirian umat Paroki Santo Joanne Baptista Wolosambi; *Ketiga*, menemukan dan menguraikan dampak yang muncul dari keterlibatan hierarki Gereja dalam politik bagi kemandirian umat Paroki Santo Joanne Baptista Wolosambi; *Keempat*, membantu umat dan hierarki Gereja untuk merefleksikan dan menilai peranannya sebagai persekutuan dalam kehidupan sosial politik, baik sebagai umat Allah maupun sebagai warga negara; *Keempat*, tujuan akhir dari penulisan tesis ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Teologi pada Program Studi Ilmu Agama/Teologi Katolik di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

### **1.4 Hipotesis**

Gereja merupakan lembaga yang semestinya tidak hanya bertanggungjawab untuk mengusahakan peningkatan kehidupan spiritual umat, tetapi juga memperhatikan perkembangan dari aspek kehidupan lain seperti aspek sosial, ekonomi dan politik. Perhatian terhadap aspek-aspek kehidupan tersebut pertama-tama bertujuan untuk membantu lembaga-lembaga lain dalam mengusahakan terciptanya kebaikan dan kesejahteraan bersama. Hal ini dapat ditunjukkan melalui keterlibatan aktif hierarki Gereja dalam seluruh aspek tersebut baik sosial, ekonomi, bahkan politik.

Gereja dan hierarkinya tidak harus selalu berjuang untuk hanya menghidupi atau mengusahakan perkembangan Gereja sebagai sebuah institusi melainkan juga berjuang untuk kesejahteraan umatnya sebagai bagian integral dari persekutuan umat Allah. Sehingga, setiap usaha yang digalakkan atau digerakkan

dengan tujuan untuk peningkatan kemandirian Gereja semestinya, di waktu yang sama, juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian umat.

Upaya meningkatkan kemandirian umat dapat ditempuh melalui keterlibatan hierarki Gereja dalam dunia politik. Dengan terlibat dalam politik, hierarki Gereja, dapat mengupayakan terbukanya akses menuju sarana-sarana yang disediakan negara agar dapat juga dimanfaatkan secara baik oleh umat atau masyarakat. Terbukanya akses menuju sarana-sarana negara itu akan sangat membantu umat untuk mengembangkan atau meningkatkan potensi dirinya, yang tentunya akan berdampak pada kemandiriannya, baik dalam aspek teologis, aspek daya, dan aspek dana.

Dengan kata lain intensitas keterlibatan hierarki Gereja dalam politik akan sangat berpengaruh secara langsung pada situasi atau kondisi kemandirian umat. Semakin tinggi intensitas keterlibatannya maka kondisi kemandirian umat akan semakin baik. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah intensitas keterlibatan hierarki Gereja dalam politik maka semakin rendah atau buruk pula kondisi kemandirian umatnya.

### **1.5 Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dan kuantitatif. Berkaitan dengan metode penelitian kuantitatif penulis membuat analisis kepustakaan dengan mendalami materi-materi dan sumber-sumber yang mengulas tentang hierarki Gereja, politik, dan kemandirian umat. Sedangkan berkaitan dengan metode penelitian kualitatif, penulis membuat penelitian lapangan dengan instrumen pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Data-data yang akan diperoleh dari kedua instrumen tersebut diolah dalam hubungan dengan analisis dan penilaian terkait keterlibatan hierarki Gereja dalam dunia politik dan urgensinya bagi pengembangan kemandirian umat di Paroki Santo Joanne Baptista Wolosambi.

### **1.6 Lokasi Dan Subyek Penelitian**

Lokasi penelitian penulisan karya ilmiah ini ialah Paroki Santo Joanne Baptista Wolosambi. Sebuah paroki yang termasuk dalam wilayah Kevikepan Mbay, Keuskupan Agung Ende dan secara administratif merupakan bagian dari

Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Sedangkan subyek penelitian penulisan karya ilmiah ini ialah Para pastor yang bertugas di Paroki Santo Joanne Baptista Wolosambi, Pengurus DPP Paroki, Aparat Pemerintahan Desa, dan Umat Paroki yang bersangkutan.

### **1.7 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penelitian ini ialah *pertama*, membantu Gereja atau hierarki (para imam) yang dipercayakan menjadi pemimpin Gereja setempat untuk menilai peranannya atau para pendahulunya bagi kehidupan dan perkembangan Gereja serta bagi kehidupan dan perkembangan umat. Penilaian itu menjadi hal yang penting untuk menunjang karya pelayan pastoral di wilayah yang sudah dipercayakan kepada mereka dan memungkinkan penentuan rencana strategis pastoral yang tepat serta berdaya transformatif di masa yang akan datang. *Kedua*, membantu setiap anggota Gereja untuk berani menentukan keberpihakan di tengah persoalan-persoalan yang terjadi. *Ketiga*, membantu penulis mengimplementasikan ilmu yang diperoleh untuk menilai realitas dan memberikan tanggapan atau solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Penulisan karya ilmiah ini dibagi ke dalam lima bagian besar atau bab. Pada bab I secara berturut-turut dipaparkan latar belakang penulisan karya ilmiah ini, rumusan masalah atau persoalan yang diangkat, tujuan penulisan, hipotesis, metode penulisan yang digunakan, lokasi dan subyek penelitian, manfaat penulisan, dan akan diakhiri dengan pembahasan tentang sistematika penulisannya.

Bab II berisikan penjelasan tentang konsep hierarki Gereja, konsep politik, dan konsep kemandirian umat. Pembahasan tentang konsep-konsep tersebut dibagi lagi ke dalam empat pokok bahasan yakni pembahasan tentang konsep hierarki Gereja, pembahasan tentang konsep politik, pembahasan tentang konsep kemandirian umat, dan akan ditutup dengan pembahasan tentang hubungan atau korelasi di antara ketiganya.

Pada Bab III dibahas secara khusus tentang lokasi yang menjadi sasaran penelitian karya ilmiah ini dan juga temuan dari penelitian tentang keterlibatan

hierarki Gereja dalam dunia politik serta upaya pengembangan kemandirian umat. Terdapat dua hal pokok bahasan yang akan dipaparkan pada bagian ini yakni *pertama*, pembahasan tentang profil Paroki Santo Joanne Baptista Wolosambi. Beberapa pokok bahasan yang dibahas pada bagian ini yaitu sejarah berdirinya Paroki, letak geografis, keadaan demografis, keadaan sosio-budayanya, keadaan sosio-politik, dan pembahasan tentang karya dan perkembangan Paroki Santo Joanne Baptista Wolosambi dalam berbagai aspek kehidupan seperti di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kerohanian, bidang pembangunan, dan bidang ekonomi. Bagian *kedua* akan berisikan pembahasan tentang hasil temuan dari penelitian tentang keterlibatan hierarki Gereja dalam dunia politik dan upaya pengembangan kemandirian umat. Pembahasan pada bagian kedua ini ditutup dengan kesimpulan.

Bab IV berisikan hasil analisis terhadap temuan penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya. Pembahasan di dalam bab ini dibagi lagi ke dalam lima (5) pokok bahasan yakni pembahasan tentang dasar keterlibatan hierarki Gereja dalam dunia politik, penilaian terhadap keterlibatan hierarki Gereja yang pernah bertugas di Paroki Santo Joanne Baptista Wolosambi dalam dunia politik beserta peluang dan tantangannya, metode keterlibatan hierarki Gereja dalam dunia politik dan upaya pengembangan kemandirian umat, urgensi keterlibatan hierarki Gereja dalam dunia politik bagi pengembangan kemandirian umat, dan ditutup dengan kesimpulan.

Bab V merupakan bab penutup dari penulisan karya ilmiah ini. Pada bab ini, penulis akan memaparkan rangkuman atas semua pembahasan yang telah dibuat. Selain itu penulis juga akan mengemukakan beberapa rekomendasi berdasarkan temuan dan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya bagi para klerus (hierarki Gereja) yang dipercayakan menjadi Pastor Paroki di Paroki Santo Joanne Baptista Wolosambi selanjutnya, Pimpinan Gereja lokal, dan sekolah-sekolah atau Perguruan Tinggi Katolik yang mendampingi dan membimbing calon-calon imam.